



KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

NOMOR B. 2665 /Kpts/RC.020/G/12/2018

TENTANG

RENCANA KERJA TAHUNAN

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas pembangunan pertanian, nilai maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dengan menggunakan metode *Internal Audit Capability Model (IA-CM)*, perlu adanya pedoman dan panduan dalam pelaksanaan serta pencapaian target sasaran program/kegiatan pengawasan di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian pada Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu adanya rencana kerja tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 dan 2025, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

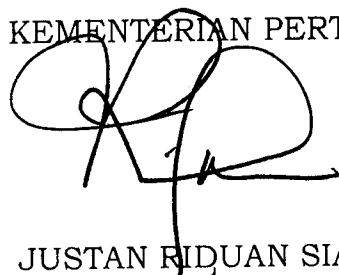
9. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.02/2013;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN TENTANG RENCANA KERJA TAHUNAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2019.

- KESATU : Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan rencana kerja pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan pertanian.
- KETIGA : Seluruh unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian wajib berpedoman pada Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 26 Desember 2018
INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN,


JUSTAN RIDUAN SIAHAAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Sekretaris Itjen;
4. Inspektur I;
5. Inspektur II;
6. Inspektur III;
7. Inspektur IV;
8. Inspektur Investigasi.

Lampiran I Surat Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian
Nomor : 2665 / KPTS / RC.020 / G / 12 / 2018
Tanggal : 26 DESEMBER 2018

RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2019

Eselon II	Jumlah Rencana PP	Jumlah Rencana HR	Ang. Awal
1. Inspektorat I	152	1.999	10.330.450.000
2. Inspektorat II	225	1.358	10.222.550.000
3. Inspektorat III	147	1.106	10.012.170.000
4. Inspektorat IV	208	1.294	9.949.380.000
5. Inspektorat Investigasi	153	1.173	10.182.360.000
6. Sekretariat Inspektorat Jenderal	233	2.492	43.711.554.000
Total	1.118	9.422	94.408.464.000

Lampiran II Surat Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian
 Nomor : 2665 / KPTS / RC.020/G / 12 / 2018
 Tanggal: 26 DESEMBER 2018

RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2019

No. RKT	Uraian	Jumlah Rencana PP	Jumlah Rencana HP	Ang. Awal
Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian		1.118	9.422	94.408.464.000
1. Inspektorat I		152	1.999	10.330.450.000
2019.2.001	Audit Ketaatan pada Direktorat Jenderal Hortikultura		10	15.780.000
2019.2.002	On The Spot Audit Ketaatan Pada Direktorat Jenderal Hortikultura		30	94.995.000
2019.2.003	Audit Ketaatan pada Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian		10	15.780.000
2019.2.004	On The Spot Audit Ketaatan/PNBP Pada Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian		30	94.995.000
2019.2.005	Audit Ketaatan pada Biro Umum Dan Pengadaan		10	15.780.000
2019.2.006	Audit Ketaatan pada Pusat Data Informasi Pertanian		10	15.780.000
2019.2.007	Audit Ketaatan pada Biro Keuangan dan Perlengkapan		10	15.780.000
2019.2.008	On The Spot Audit Ketaatan Pada UPT Sekretariat Jenderal		30	94.995.000
2019.2.009	Audit Layanan pada Satker Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian		10	15.600.000
2019.2.010	On The Spot Audit PNBP Pada Satker Lingkup Sekretariat Jenderal		30	94.995.000
2019.2.011	Audit Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Pertanian Kab. Lombok Timur		8	45.709.382
2019.2.012	Audit Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Pertanian Kabupaten Garut		8	43.525.373
2019.2.013	Audit Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tp		8	43.525.373
2019.2.014	Audit Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Karanganyar		8	43.525.373
2019.2.015	Audit Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Pertanian Provinsi D.I. Yogyakarta		8	43.525.373
2019.2.016	Audit Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tp		8	43.525.373
2019.2.017	Audit Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Pertanian Dan Perkebunan Prov. Aceh Tp		8	43.525.373
2019.2.018	Audit Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Provinsi Jambi		8	43.525.373
2019.2.019	Audit Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan		8	43.525.373
2019.2.020	Audit Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat		8	43.525.373
2019.2.021	Audit Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas		8	43.525.373
2019.2.022	Audit Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur		8	43.525.373
2019.2.023	Audit Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara		8	43.525.373
2019.2.024	Audit Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah		8	43.525.373
2019.2.025	Audit Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan		8	43.525.373
2019.2.026	Audit Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Pertanian Kabupaten Enrekang		8	43.525.373
2019.2.027	Audit Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Bali		8	43.525.373
2019.2.028	Audit Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan		8	43.525.373
2019.2.029	Audit Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat		8	43.525.373
2019.2.030	Audit Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo		8	43.525.373